



Analisis Standar Dan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

Eni Furwanti¹, Nanin Apriani², Yanti Krismayanti³,
Ujang Capi Barlian⁴, Waska Warta⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini Universitas Islam Nusantara

Email: ³Krismayanti2005@gmail.com

Received: 2022-01-10; Accepted: 2022-02-27; Published: 2022-02-28

Abstrak

Standar nasional PAUD sulit dipenuhi oleh satuan PAUD yang sebagian besar dikelola masyarakat (96%), tumpang tindih satuan dan program dalam penyelenggaraan layanan PAUD, persyaratan pengajuan izin dan pembaharuan izin sulit dipenuhi oleh satuan PAUD yang dikelola Masyarakat. Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pembelajaran pendidikan anak usia dini di PAUD Adinda Kec. Rancasari Bandung. Subyek penelitian merupakan subyek yang akan dituju oleh peneliti untuk diteliti, yang dimaksud yaitu orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka sebagai pusat sasaran penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memilih melakukan penelitian di PAUD Adinda Kec. Rancasari Bandung, karena peneliti tertarik untuk melihat bagaimana evaluasi pembelajaran pendidikan anak usia dini di PAUD Adinda Kec. Rancasari Bandung. Teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi. PAUD Adinda telah memenuhi standar yang sesuai dengan kebijakan tentang standar Paud permen 137 2014 dan 146 2014 tentang pembelajaran PAUD. Walaupun ada yang belum sejalan tetapi bukan hal yang krusial. Sehingga PAUD ini tetap bisa melaksanakan KBM di saat pandemi dan sebelum pandemi.

Kata Kunci: *standar pembelajaran, evaluasi pembelajaran, anak usia dini.*

Abstract

PAUD national standards are difficult to meet by PAUD units, most of which are managed by the community (96%), overlapping units and programs in providing PAUD services, requirements for applying for permits and renewing permits are difficult to fulfill by PAUD units managed by the community. This article uses a descriptive qualitative method because the focus of this research is to determine the evaluation of early childhood education learning in PAUD Adinda Kec. Rancasari Bandung. The research subject is the subject that will be addressed by the researcher for research, which is the person, place or object observed in the context of being the center of the research target. In this study the researchers chose to conduct research in PAUD Adinda Kec. Rancasari Bandung, because researchers are interested in seeing how the evaluation of early childhood education learning in PAUD Adinda Kec. Rancasari Bandung. Data collection techniques are: observation, interviews, documentation. Adinda's PAUD has met the standards in accordance with the policies regarding the Permen 137 2014 and 146 2014 PAUD standards regarding PAUD learning. Although there are things that are not in line, they are not crucial. So that this PAUD can still carry out KBM during the pandemic and before the pandemic.

Keywords: *learning standards, learning evaluation, early childhood.*

Copyright © 2022 Hadlonah : Jurnal Pendidikan dan Pengasuhan Anak

LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia sebagai anggota Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) turut serta dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau *SDGs*) yang selanjutnya disebut dengan TPB dan *SDGs*. *SDGs* merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. *SDGs* berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Tujuan keempat adalah pendidikan berkualitas, yaitu “menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan menata serta meningkatnya kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua (Musthafa & Meliani, 2021). Pendidikan sangat penting hal itu sejalan dengan, kata kata bijak Nelson Mandela, “Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa anda gunakan untuk mengubah dunia”. Di tahun 2045 Indonesia Emas akan memiliki visi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo menggagas “Impian Indonesia 2015-2085”, yaitu: (1) Sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa bangsa lain di dunia; (2) Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika; (3) Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia; (4) Masyarakat dan aparatur Pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi; (5) Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia; (6) Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik; dan (7) Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia (Bappenas, 2018).

Visi Indonesia emas akan terwujud dengan cara membangun generasi emas 2045 yang dibekali dengan keterampilan abad 21 yaitu: pertama, kualitas karakter (bagaimana siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis), meliputi religius, nasionalis mandiri, gotong royong, dan berintegritas. Kedua, literasi dasar (bagaimana siswa menerapkan keterampilan dasar sehari-hari), meliputi literasi bahasa, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya dan kewarganegaraan. Ketiga, kompetensi (bagaimana siswa memecahkan masalah kompleks) meliputi; berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Ketiga keterampilan abad 21 akan terlaksana melalui pendidikan. Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan paling awal, dimana Usia dini merupakan periode awal yang penting dan mendasar dalam pertumbuhan dan perkembangan anak karena semua potensi anak berkembang sangat cepat pada usia tersebut. Saat anak menginjak usia dini menjadi langkah awal dalam membentuk akhlak anak dan mengenalkan nilai baik agar anak menjadi individu yang berkarakter (Meliani et al., 2021).

Berbagai hasil penelitian di bidang ilmu psikologi dan pendidikan menunjukkan bagaimana stimulasi yang diberikan pada jenjang PAUD akan berdampak positif terhadap perkembangan sosial, emosi, kognitif, bahasa dan juga moral seorang anak. Anak yang memperoleh stimulasi sejak dini akan memiliki prestasi akademis yang cenderung lebih baik di masa yang akan datang. PAUD memiliki dampak jangka panjang, dan bahkan turut memberi imbal hasil pada pertumbuhan ekonomi suatu negara (Heckman, 2011, Waber dkk, 2007).

Keniscayaan PAUD harus mendapatkan prioritas investasi hal itu dikarenakan Menyiapkan Anak untuk Sekolah, meningkatkan indeks pembangunan manusia, memperbaiki gizi anak balita, mengurangi angka buta huruf muda, mengurangi angka mengulang, mengurangi angka putus sekolah, mempercepat pencapaian wajib belajar, dan meningkatkan

mutu Pendidikan (Meliani et al., 2014). Sehingga pemerintah berupaya melalui kebijakan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa: 1) PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, 2) PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Selanjutnya yang mengatur standardisasi PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khusus PAUD ditunjukkan dengan merevisi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar penyelenggaraan PAUD, yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang standar PAUD. Standar tersebut terdiri dari Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini selanjutnya disebut STPPA, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar pendidik dan, Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan. Selain kebijakan pemerintah direktorat jendral PAUD memiliki rencana PAUD 2011-2045, dimulai dengan gerakan PAUD nasional, pemantapan mutu-fundamen berkualitas, standar mutu nasional (Izma, 2020).

Sejatinya tujuan utama dari PAUD adalah mempersiapkan pertumbuhan, perkembangan, dan pembelajaran anak. Pendidikan usia dini penting bagi agenda pembangunan Indonesia dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk pembangunan di masa depan. Ketersediaan PAUD di tiap desa masih di angka 73%, Partisipasi anak-anak yang berada di Pulau Jawa dalam pendidikan pra-sekolah cenderung lebih besar dibandingkan anak-anak yang tinggal di luar Pulau Jawa. Di Yogyakarta, capaian APK PAUD adalah sebesar 68,47%, sedangkan Provinsi Papua hanya mencapai 12,44%. Selain itu, data BPS menunjukkan bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga berpendapatan menengah ke bawah dan mereka yang tinggal di daerah perdesaan cenderung lebih sedikit mengikuti pendidikan pra-sekolah, dengan hanya sepertiga anak-anak Indonesia yang mengikuti pendidikan pra-sekolah (Bappenas).

Menurut direktur PAUD kondisi penguatan SDM PTK PAUD, pengetahuan belum sama antar pendidik dengan antar dan tenaga kependidikan PAUD, kesenjangan kualifikasi dan kompetensi PTK PAUD, sistem pengembangan kompetensi PAUD, dan pemahaman Guru SD terhadap metode pembelajaran PAUD. Peningkatan kualitas pelayanan, layanan PAUD HI diimplementasikan di semua sistem PAUD, belum tersedia capaian tumbuh kembang anak, belum tersedia informasi tentang kualitas pembelajaran PAUD, keselarasan masa transisi antara PAUD dan SD belum optimal, dan peran orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan belum optimal. Pemenuhan Akses PAUD, Akses terhadap PAUD (terutama usia 5-6 tahun) masih rendah, masih terjadi disparitas akses PAUD antarwilayah, belum ada pemetaan akses PAUD untuk memperkuat kebijakan, dan implementasi PP NO. 2/2018/tentang SPM belum dilaksanakan oleh semua kab/kota. Penguatan tata kelola PAUD, Standar nasional PAUD sulit dipenuhi oleh satuan PAUD yang sebagian besar dikelola masyarakat (96%), tumpang tindih satuan dan program dalam penyelenggaraan layanan PAUD, persyaratan pengajuan izin dan pembaharuan izin sulit dipenuhi oleh satuan PAUD yang dikelola Masyarakat.

Layanan PAUD belum memiliki prioritas, sehingga dampak terhadap intervensi layanan tidak terlihat, anggaran minimum untuk mencapai PAUD berkualitas. Ini untuk permasalahan di tingkat nasional, untuk kota Bandung PAUD yang sudah terakreditasi sebanyak Provinsi Jawa Barat mengakreditasi sebanyak 4.969 satuan PAUD dengan hasil akreditasi satuan PAUD terdiri dari 306 satuan (5,59%) terakreditasi A, 2.890 satuan (52,78%) terakreditasi B, 1.772 satuan (32,36%) terakreditasi C, dan 1 satuan (0,02%) tidak terakreditasi. Akreditasi dilakukan

bermanfaat bagi pemerintah adalah sebagai usaha pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Akreditasi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban publik pemerintah atas mutu program dan satuan PAUD dan PNF. Akreditasi juga berfungsi sebagai perlindungan sosial (*social guarantee*) kepada masyarakat dalam jaminan kualitas pendidikan dapat dijadikan sebagai *quality assurance* yang diharapkan mengarahkan lembaga untuk menjaga dan meningkatkan mutu Pendidikan (Irjus, 2020), oleh karena itu diperlukan akreditasi yang dinilai dari standarisasi dan pembelajaran di PAUD agar tercapai generasi emas 2045.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pembelajaran pendidikan anak usia dini di PAUD Adinda Kec. Rancasari Bandung. Subyek penelitian merupakan subyek yang akan dituju oleh peneliti untuk diteliti, yang dimaksud yaitu orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka sebagai pusat sasaran penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memilih melakukan penelitian di PAUD Adinda Kec. Rancasari Bandung. karena peneliti tertarik untuk melihat bagaimana evaluasi pembelajaran pendidikan anak usia dini di PAUD Adinda Kec. Rancasari Bandung. Teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada PAUD Adinda Standar kompetensi lulusan mengacu pada kurikulum 2013 yaitu Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) dan kurikulum lokal khas Adinda. Standar Kompetensi Lulusan di PAUD sama dengan Kesiapan Belajar untuk kejenjang sekolah selanjutnya. Di PAUD Adinda pada standar isi pembelajaran semasa pandemi masih menggunakan Tema, sub tema yang dikembangkan dengan memuat unsur-unsur enam aspek perkembangan, yaitu: nilai agama dan moral, kemampuan berpikir, kemampuan berbahasa, kemampuan sosial-emosional, kemampuan fisik-motorik, serta apresiasi terhadap seni. Standar proses pada PAUD Adinda terdiri dari: (1) Perencanaan Pembelajaran meliputi: Prota, promes, RPPM dan RPPH. (2) Pelaksanaan Pembelajaran Mengacu Prota, promes, RPPM dan RPPH. Sebelum masa pandemi pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode sentra dan metode montessorri. (3) Evaluasi Pembelajaran berupa evaluasi pembelajaran setiap satu bulan sekali yang mencakup rencana, proses dan hasil pembelajaran, yang dilakukan oleh guru, wakil kepala sekolah dan kepala. (4) Pengawasan Pembelajaran Dilakukan oleh kepala sekolah, yayasan dan penilik PAUD.

Standar Penilaian pada paud Adinda berupa: (1) BB: Belum berkembang, (2) MB: Mulai Berkembang, (3) BSH: Berkembang sesuai harapan, dan (4) BSB: Berkembang sangat baik. Dengan proses sebagai berikut: Penilaian harian di rangkum menjadi Penilaian Pekan di rangkum menjadi penilaian Penilaian Bulanan, di rangkum menjadi Penilaian semester selanjutnya bahan pembagian raport. Yaitu berupa hasil rangkuman penilaian dari Hasil karya Observasi (*daily report*), Eksperimen dll. Pada saat pandemi tahun pertama, ditemukan selama tiga bulan sekolah tidak beroperasi, selajutnya beroperasi kembali dengan cara daring namun hanya bertahan 2 bulan. Standar Pendidik dan tenaga kependidikan pada paud Adinda

ditemukan pendidik tidak linear yaitu lulusan Pendidikan Bahasa arab dan SMA, dan tenaga pendidik lebih dari cukup terdiri dari enam orang, namun yang terdaftar didapodik baru 3 orang, dikarenakan terkait dengan peraturan jumlah rombel 1: 8. Selanjutnya PAUD Adinda tidak memiliki tenaga kependidikan, jabatan tersebut dirangkap oleh kepala sekolah. Dari paparan diatas mengenai guru paud yang tidak linear Yayasan telah menyelenggarakan pelatihan dan motivasi kerja setiap sebulan sekali baik pelatihan internal maupun eksternal, Adapun dengan rangkap tugas kepala sekolah akan menjadi masalah Ketika kepala sekolah ada tugas di luar sekolah.

Standar Sarana dan Prasarana pada PAUD Adinda Belum memiliki sarana yang memadai sesuai dengan daya tampung dengan kata lain lahan bermain sempit. Terdapat 3 rombongan belajar dengan jumlah siswa 32 orang, memiliki sarana dan prasarana pendukung yang layak tapi masih kurang. Belum memiliki lapangan, palyground outdoor memadai dan perpustakaan. Selain itu belum memiliki lahan parkir guna kenyamanan guru maupun orangtua Ketika mengantar dan menjemput. Oleh karena itu kemacetan Ketika masuk dan pulang sekolah tidak bisa dihindari. Standar Pengelolaan pada paud adinda diantaranya: (1) Yayasan Di bantu oleh kepala Bidang dan HRD, (2) Kepala Sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah bidang Kurikulum & Kesiswaan dan Konselor sekolah, (3) POMG Dalam kegiatan anak dan kebijakan, (4) Masyarakat dan Bekerjasama dengan instansi terkait mengenai program puncak tema.

Standar Pembiayaan pada paud Adinda berupa: (1) RAPBS (rencana anggaran pembiayaan sekolah) yang disusun 5 bulan sebelum terlaksananya tahun ajaran baru, RAPBS berisi tentang rencana pendapatan sekolah, rencana pengeluaran sekolah bersumber biaya dari pembayaran dari orang tua murid berupa SPP dan biaya daftar ulang tahunan. (2) BOP Perealisasian anggaran tersebut sesuai dengan RKAS yang telah di susun sebelumnya. (3) HPM Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota atau masyarakat sebagai imbalan atas jasa atau pengabdian yang telah dilakukan pada dunia Pendidikan. Pada PAUD Adinda Standar kompetensi lulusan mengacu pada kurikulum 2013 yaitu Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) dan kurikulum lokal khas Adinda. Standar Kompetensi Lulusan di PAUD sama dengan Kesiapan Belajar untuk kejenjang sekolah selanjutnya. Peneliti menganalisa bahwa PAUD Adinda mengacu dan telah sejalan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 Bab III pasal 5-8.

Di PAUD Adinda pada standar isi pembelajaran semasa pandemi masih menggunakan Tema, sub tema yang dikembangkan dengan memuat unsur-unsur enam aspek perkembangan, yaitu: nilai agama dan moral, kemampuan berpikir, kemampuan berbahasa, kemampuan sosial-emosional, kemampuan fisik-motorik, serta apresiasi terhadap seni. Standar isi pada PAUD Adinda mengacu dan telah sejalan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 Bab IV Pasal 9 tentang Standar Isi PAUD. Standar proses pada PAUD Adinda terdiri dari: (1) Perencanaan Pembelajaran meliputi: Prota, promes, RPPM dan RPPH; (2) Pelaksanaan Pembelajaran Mengacu Prota, promes, RPPM dan RPPH. Sebelum masa pandemi pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode sentra dan metode montessorri; (3) Evaluasi Pembelajaran berupa evaluasi pembelajaran setiap satu bulan sekali yang mencakup rencana, proses dan hasil pembelajaran, yang dilakukan oleh guru, wakil kepala sekolah dan kepala; (4) Pengawasan Pembelajaran Dilakukan oleh kepala sekolah, yayasan dan penilik PAUD. Peneliti telah menemukan pada standar proses berupa pengawasan pembelajaran, kepala sekolah belum

sejalan dengan teori kepemimpinan dimana seorang pemimpin sebagai inisiatif, visioner, dan menggerakkan karyawannya.

Standar Penilaian pada paud Adinda berupa: (1) BB: Belum berkembang, (2) MB: Mulai Berkembang, (3) BSH: Berkembang sesuai harapan, dan (4) BSB: Berkembang sangat baik. Dengan proses sebagai berikut: Penilaian harian di rangkum menjadi Penilaian Pekan di rangkum menjadi penilaian Penilaian Bulanan, di rangkum menjadi Penilaian semester selanjutnya bahan pembagian raport. Yaitu berupa hasil rangkuman penilaian dari Hasil karya Observasi (*daily report*), Eksperimen dll. Pada saat pandemi tahun pertama, ditemukan selama tiga bulan sekolah tidak beroperasi, selajutnya beroperasi kembali dengan cara daring namun hanya bertahan 2 bulan. Pada PAUD Adinda Standar penilaian telah mengacu dan sesuai dengan Permen 137/2014 pasal 23 ayat (4) Hasil penilaian dalam bentuk laporan perkembangan anak disampaikan kepada orang tua dalam kurun waktu semester.

Standar Pendidik dan tenaga kependidikan pada paud Adinda ditemukan pendidik tidak linear yaitu lulusan Pendidikan Bahasa arab dan SMA, dan tenaga pendidik lebih dari cukup terdiri dari enam orang, namun yang terdaftar didapodik baru 3 orang, dikarenakan terkait dengan peraturan jumlah rombel 1:8. Selanjutnya PAUD Adinda tidak memiliki tenaga kependidikan, jabatan tersebut dirangkap oleh kepala sekolah. Dari paparan diatas mengenai guru paud yang tidak linear Yayasan telah menyelenggarakan pelatihan dan motivasi kerja setiap sebulan sekali baik pelatihan internal maupun eksternal, Adapun dengan rangkap tugas kepala sekolah akan menjadi masalah Ketika kepala sekolah ada tugas di luar sekolah. Penjelasan tentang kualifikasi akademik guru PAUD terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 BAB VII tentang standar tenaga Pendidik PAUD sebagai berikut:

1. Pasal 25 ayat 1a dan 1b tentang Kualifikasi Akademik Guru PAUD: (a) memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi, atau (b) memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
2. Pasal 26 ayat 1a dan 1b tentang Kualifikasi Akademik Guru Pendamping: a. memiliki ijazah D-II PGTK dari Program Studi terakreditasi, atau b. memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/ kursus PAUD jenjang guru pendamping dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.
3. Pasal 27 ayat 1a tentang Kualifikasi akademik Guru Pendamping Muda • memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang pengasuh dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.

Standar Sarana dan Prasarana pada PAUD Adinda Belum memiliki sarana yang memadai sesuai dengan daya tampung dengan kata lain lahan bermain sempit. Terdapat 3 rombongan belajar dengan jumlah siswa 32 orang, memiliki sarana dan prasarana pendukung yang layak tapi masih kurang. Belum memiliki lapangan, palyground outdoor memadai dan perpustakaan. Selain itu belum memiliki lahan parkir guna kenyamanan guru maupun orangtua Ketika

mengantar dan menjemput. Oleh karena itu kemacetan ketika masuk dan pulang sekolah tidak bisa dihindari. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kemendikbud Bab VIII tentang Standar Sarana dan prasarana pada pasal 32 tentang persyaratan sarana dan prasarana.

Sandar Pengelolaan pada PAUD adinda diantaranya: (1) Yayasan Di bantu oleh kepala Bidang dan HRD, (2) Kepala Sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah bidang Kurikulum & Kesiswaan dan Konselor sekolah, (3) POMG Dalam kegiatan anak & kebijakan, (4) Masyarakat dan Bekerjasama dengan instansi terkait mengenai program puncak tema dll. Pada hakikatnya standar pengelolaan itu pada BAB IX Standar Pengelolaan Pasal 33 Standar pengelolaan PAUD merupakan pelaksanaan yang mengacu pada standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan, peneliti menemukan pemenuhan standar ini belum sesuai sehingga pasal 33 belum terlaksana dengan baik. Standar Pembiayaan pada paud Adinda berupa: (1) RAPBS (rencana anggaran pembiayaan sekolah) yang disusun 5 bulan sebelum terlaksananya tahun ajaran baru, RAPBS berisi tentang rencana pendapatan sekolah, rencana pengeluaran sekolah bersumber biaya dari pembayaran dari orang tua murid berupa SPP dan biaya daftar ulang tahunan. (2) BOP Perealisasian anggaran tersebut sesuai dengan RKAS yang telah di susun sebelumnya. (3) HPM Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota atau masyarakat sebagai imbalan atas jasa atau pengabdian yang telah dilakukan pada dunia Pendidikan.

KESIMPULAN

Standardisasi dan pembelajaran PAUD sangat diperlukan untuk menyongsong generasi emas 2045. Hal yang terpenting dalam standardisasi yaitu pemerataan akses komunikasi, informatika dan Pendidikan di daerah-daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). untuk mendapatkan PAUD berkualitas maka permasalahan PAUD dibawah ini harus dibenahi. Kondisi penguatan SDM PTK PAUD, pengetahuan belum sama antar pendidik dengan antar dan tenaga kependidikan PAUD, kesenjangan kualifikasi dan kompetensi PTK PAUD, sistem pengembangan kompetensi PAUD, dan pemahaman Guru SD terhadap metode pembelajaran PAUD. Peningkatan kualitas pelayanan, layanan PAUD HI diimplementasikan di semua sistem PAUD, belum tersedia capaian tumbuh kembang anak, belum tersedia informasi tentang kualitas pembelajaran PAUD, keselarasan masa transisi antara PAUD dan SD belum optimal, dan peran orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan belum optimal.

Akses terhadap PAUD (terutama usia 5-6 tahun) masih rendah, masih terjadi disparitas akses PAUD antar wilayah, belum ada pemetaan akses PAUD untuk memperkuat kebijakan, dan implementasi PP NO. 2/2018/tentang SPM belum dilaksanakan oleh semua kab/kota. Penguatan tata kelola Paud, Standar nasional PAUD sulit dipenuhi oleh satuan PAUD yang sebagian besar dikelola masyarakat (96%), tumpang tindih satuan dan program dalam penyelenggaraan layanan PAUD, persyaratan pengajuan izin dan pembaharuan izin sulit dipenuhi oleh satuan PAUD yang dikelola Masyarakat. Layanan PAUD belum memiliki prioritas, sehingga dampak terhadap intervensi layanan tidak terlihat, anggaran minimum untuk mencapai PAUD berkualitas. Secara umum PAUD Adinda telah memenuhi standar yang sesuai dengan kebijakan tentang standar Paud permen 137 2014 dan 146 2014 tentang pembelajaran

PAUD. Walaupun ada yang belum sejalan tetapi bukan hal yang krusial. Sehingga PAUD ini tetap bisa melaksanakan KBM di saat dan sebelum masa pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2018). Diakses di: <http://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap> pada 1 Januari 2022, Pkl. 11.12 WIB.
- Heckman, J. (2011) The Economics of Inequality: The Value of Early Childhood Education. *American Educator*, 35, 31-47.
- Irjus, I., Hadion. W. 2020 *Pengelolaan Paud Dan Pnf Berbasis Mutu*. CV Pena Persada: Purwokerto.
- Izma, F., dkk. (2020). Persepsi Keluarga Tentang Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Pembentukan Karakter. *JoCE Journal of Community Education*, Volume 1, Nomor 1 Maret 2020.
- Meliani F., Sunarti E., & Krisnatuti D. (2014). Faktor Demografi, Konflik Kerja-Keluarga, Dan Kepuasan Perkawinan Istri Bekerja. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 7(3), 133-142. <https://doi.org/10.24156/jikk.2014.7.3.133>.
- Meliani, F., Alawi, D., Yamin, M., Syah, M., & Erihadiana, M. (2021). Manajemen Digitalisasi Kurikulum di SMP Islam Cendekia Cianjur. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(7), 653-663. <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i7.328>.
- Moleong, L, J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musthafa, I., & Meliani, F. (2021). Penerapan Metode Pembelajaran Islam Klasik Al-Zarnuji di Era Revolusi Industri 4.0. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(7), 664-667. <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i7.329>.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta.
- Sujiono. (2003). *Konsep Dasar Pendidikan Anak usia Dini*. Jakarta: Indeks.
- Waber, D.P., Moor, C.D., Forbes, P.W., Almli, C.R., Botteron, K.N., Leonard, G., Milovan, D., Paus, T., Rumsey, J. (2007). The NIH MRI Study Of Normal Brain Development: Performance Of A Population Based Sample Of Healthy Children Aged 6 To 18 Years On A Neuropsychological Battery. *J Int Neuropsychol Soc*,13(5):729-46. Doi: 10.1017/S1355617707070841.